

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MI ISLAMIYAH KIJANG KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU

Norisya Sugiyanti¹, Ria Kurniawati²

Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

E-mail: ¹norisyaicha19@gmail.com, ²riakuniawati99@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MI Islamiyah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: otonomi dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah dan pengembangan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Islamiyah Kijang memanfaatkan otonomi secara efektif untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka sesuai kebutuhan siswa. Transparansi dan akuntabilitas terlihat dari keterlibatan masyarakat, pelatihan profesional guru, dan evaluasi rutin. Selain itu, partisipasi aktif orang tua memperkuat kegiatan sosial dan pendidikan di sekolah. Studi ini menegaskan peran MBS dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, otonomi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pendidikan Islam.

Abstract: This study examines the implementation of School-Based Management (SBM) at MI Islamiyah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, as a strategic approach to enhancing education quality. The research focuses on three main aspects: autonomy and partnerships, transparency and accountability, and community participation in school management and curriculum development. The findings highlight that MI Islamiyah Kijang effectively utilizes its autonomy to adapt and integrate the 2013 Curriculum and Independent Curriculum to meet students' needs. Transparency and accountability are demonstrated through community involvement, professional teacher training, and regular evaluations. Furthermore, active participation from parents strengthens the school's social and educational activities. This study underscores SBM's role in fostering a collaborative, transparent, and accountable educational environment, promoting continuous quality improvement.

Keywords: School-Based Management, autonomy, accountability, community participation, Islamic education

PENDAHULUAN

Sekolah di pandang sebagai suatu organisasi yang di desain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata, dan diberdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, sarana, dan prasarana. Secara eksternal, sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal. Di dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki *stakeholders* (yang berkepentingan), antara lain murid, guru, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, oleh karena itu sekolah memerlukan pengelolaan (manajemen) yang akurat agar dapat memberikan hasil optimal sesuai dengan kubutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Fattah, 2004).

Manajemen pendidikan merupakan proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, labolatorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Mulyasa, 2022).

Perubahan susasana sosial politik di Indonesia yang muncul dari adanya krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial politik berimplikasi kepada perubahan dalam berbagai bidang antara lain bidang pendidikan. Isu sentralisasi dan desentralisasi yang sebelumnya telah dimunculkan sebagai upaya pemberdayaan daerah telah semakin menguat. Terdorong oleh suasana perubahan politik kenegaraan, semakin diyakini bahwa salah satu upaya penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, adalah dengan pemberdayaan sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang intinya memberikan kewenangan (*delegation of outhrity*) kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*quality contious improvement*) (Fattah, 2004).

Permasalahan pendidikan Indonesia dalam berbagai tingkat dan jenjang sangatlah kompleks, mulai dari persoalan yang berhubungan dengan sistem dan kebijakan, kurangnya pengawasan sampai pada permasalahan sarana dan prasarana dan tata kelola pada tingkat satuan pendidikan. Permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi dengan dilaksanakannya sistem pengelolaan dalam manajemen yang berbasis pada sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam upaya menciptakan sekolah efektif sehingga dapat mewujudkan pendidikan menjadi berkualitas (Andang, 2014). Karena jabatan sebagai pemimpin atau manajer adalah amanah yang harus dipelihara dengan baik dan penuh keadilan (Sutikno, 2012). Firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu mennyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”

Penerapan MBS merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang langsung pada tingkat sekolah untuk mengelola dan menyelenggarakan sekolahnya menjadi mandiri. Pengelolaan sekolah dalam prespektif desentralisasi pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga sekolah-sekolah dapat berkembang dengan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh unsur-unsur sekolah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, baik dalam ikut merencanakan, pengambilan keputusan, melaksanakan, maupun mengevaluasi harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan desentralisasi pendidikan sangat diperlukan untuk ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam mengembangkan sekolah sehingga pencapaian mutu pendidikan dapat dilakukan secara efektif (Andang, 2014).

MBS menjadi alterntaif pelaksanaan manajemen sekolah yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan sekolah sebagai agen perubahan sosial yang cepat di masyarakat (Syafuruddin, 2008). Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengeloaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, Saud (2001) berdasarkan pelaksanaan di Negara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasar MBS adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional, serta adanya team work yang tinggi dan professional (Syafuruddin, 2008).

Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Manajamen Berbasis Sekolah di MI Islamiyah Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Dengan adanya penerapan MBS, menjadikan sekolah lebih mandiri dalam menngelola sekolah, serta dapat memunculkan kreatifitas sekolah dengan memanfaatkan sumber daya, sumber dana yang ada, dan sumber belajar guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Hasil pengamatan penulis dilapangan, bahwa MI Islamiyah Kijang telah menerapkan MBS. Dengan penerapan MBS, sekolah lebih leluasa dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki sekolah, guna menjaga eksistensinya ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan tingginya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap MI Islamiyah Kijang.

Maka dalam riset ini penulis akan membahas tentang “Impelementasi Manajemen Berbasis Sokolah di MI Islamiyah Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Secara sederhana *implementasi* bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (1979) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi: Browne dan Wildavsky (1983) juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (dalam pressman dan Wildavasky, 1984); Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughlin (dalam Mann, 1978). Pengertian ini lain dikemukakan oleh Schubert (1986) bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu *implementasi* tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa objek manajemen

Manajemen Berbasis Sekolah

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah MBS (manajemen berbasis sekolah) pertama kali dipopulerkan sebagai suatu pendekatan terhadap perencanaan oleh Peter Drucker (1954). Pengertian MBS secara leksikal berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Secara konseptual, Mallen dkk. dalam Abu Duhou (2002) mendefiisikan MBS sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang (Fattah, 2004).

MBS merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memeberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam menejemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pehamana masyarakat terhadap pendidikan. Pada sistem MBS, sekolah memiliki “*Full authourity and responsibility*” dalam meneteapkan program-program pendidikan dan berbagi kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan (Mohrman and Wihlsetter, 1994). Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk menetapkan berbagai program dan kegiatan, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Istilah MBS di berbagai Negara dikemukakan secara berbeda. Namun, intinya adalah sama, yaitu memberikan keluasaan kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya secara mandiri.

Istilah tersebut, antara lain *sitebased management*, *delegated management*, *communitybased management*, *school otonomy* atau *local management of school*. Dalam konteks MBS, sekolah memperoleh kewenangan (*authority*), kewajiban (*responsibility*), dan tanggung jawab (*accountability*) dalam pengelolaan sekolah. Dengan diterapkannya MBS, diharapkan sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang menyeluruh dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam posisi inilah, peran MBS dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas dapat diharapkan (Andang, 2014).

Dalam pelaksanaan di Indonesia, perlu ditekankan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model-model MBS dari Negara lain. Sebaliknya Indonesia akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan MBS dinegara lain, kemudian memodifikasi, merumuskan, dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat, dan pengalaman-pengalaman pribadi di bidang pengelolaan pendidikan yang telah dan sedang berlangsung selama ini

Komponen Manajemen Berbasis Sekolah

Hal yang paling penting dalam implementasi MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri sedkitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS, yaitu Kurikulum dan Program Pengajaran, Tenaga Kependidikan, Kesiswaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat, serta Manajemen Pelayanan Khusus Lembaga Pendidikan. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajemen Kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Utuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala sekolah sebagai pengelolaan program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menyebarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan oprasional kedalam program tahunan, catur wulan dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.

Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan akan tercapai, yakni tersedinya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas

Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan pencatatan siswa dari mulai proses penerimaan sehingga siswa tersebut keluar dari sekolah disebabkan tamat/lulus. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua pengaturan yang berhubungan dengan siswa digarap oleh manajemen kesiswaan. Penggarapan kesiswaan adakalanya termasuk ke dalam menjemen kurikulum, seperti membagi-bagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, yaitu kelompok

belajar termasuk garapan manajemen kurikulum dan pemberian SPP untuk diatur penarikan dananya, termasuk kedalam manajemen keuangan.

Bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki empat tugas yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Keuangan

Keuangan merupakan potensi sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Manajemen keuangan sendiri merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Dengan kata lain, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan, gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana dan prasarana dan sebagainya. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan lembaga Pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses ngajar mengajar, seperti gedung , ruang kelas meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang di maksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pegajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran

Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antar sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Manajemen Pelayanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari MBS yang efektif dan efisien.

Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu "...manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani" (UU SPN, bab II pasal 4). Untuk kepentingan tersebut, di sekolah-sekolah dikembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah (UKS), dan berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat.

Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang nyaman

METODE

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi otonomi dan kemitraan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran melalui manajemen berbasis sekolah di MI Islamiyah Kijang Penyusunan Kurikulum

Pengembangan Kurikulum di MI Islamiyah Kijang dilakukan secara otonomi oleh sekolah. Penyusunan tersebut dilakukan sendiri oleh bagian kurikulum. Mereka bertugas untuk mengembangkan kurikulum di MI Islamiyah Kijang berusaha menyesuaikan kurikulum yang akan digunakan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Kurikulum yang di gunakan MI Islamiyah Kijang adalah gabungan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

Pembuatan Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan yang digunakan di MI Islamiyah Kijang dibuat sendiri oleh sekolah termasuk kalender pendidikan waktu belajar, ujian, dan hari libur.

Mengadakan Rapat Rutin

MI Islamiyah Kijang, para warga sekolah selalu mengadakan rapat rutin untuk menyusun Program pembelajaran yang dilaksanakan setiap awal dan akhir semester.

Evalusi

Alat evaluasi yang digunakan MI Islamiyah Kijang untuk siswa berupa rapot dan mempunyai standar nilai, apa bila siswa tidak mencapai target nilai maka dilakukan remedial.

Peraturan Akademik

Aturan di MI Islamiyah mencakup ketentuan umum seperti kehadiran, ketepatan waktu, penggunaan seragam, dan etika perilaku. Dalam kegiatan belajar, peraturan mencakup jadwal pelajaran, standar kompetensi akademik, tugas dan pekerjaan rumah, serta prosedur ujian dan sistem penilaian. Selain itu, terdapat peraturan disiplin yang mengatur keterlambatan, kebersihan lingkungan, penggunaan fasilitas sekolah, serta jenis pelanggaran beserta sanksinya.

Di sekolah MI Islamiyah Kijang semua pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, masyarakat) dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sekolah juga bertanggung jawab atas kualitas pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan sekolah, termasuk kurikulum dan anggaran, dilakukan secara terbuka. Program yang dirancang memiliki dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran melalui manajemen berbasis sekolah di MI Islamiyah Kijang

Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar MI Islamiyah Kijang dapat dilihat dari segi peningkatan prestasi murid-murid. Kepala sekolah mengatakan bahwa guru-guru mampu meningkatkan kreatifitas para murid disaat proses pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan adanya prestasi akademik dan nonakademik yang diperoleh oleh murid MI Islamiyah Kijang.

Keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat

Transparansi di MI Islamiyah Kijang sangat jelas sebab semua aktifitas yang mereka lakukan melibatkan semua pihak misalnya mengundang dari pemerintah setempat seperti kementerian agama Bintan.

Supervisi Guru

Evaluasi untuk guru yaitu seringnya kepala sekolah memantau langsung proses ngajar mengajar di kelas.

Sertifikasi Pelatihan Guru

Akuntabilitas Digunakan di MI Islamiyah Kijang dalam hal pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalismen guru. Kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh para guru dan kepala sekolah biasanya dibiayai oleh pemerintah dan ada juga yang sekolah buat dengan mengundang narasumber.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran melalui manajemen berbasis sekolah di MI Islamiyah Kijang

Keikutsertaan Orang Tua Dalam Kegiatan Sekolah

Di MI Islamiyah untuk para orang tua mereka mempunyai paguyuban orang tua dimana mereka setiap tahunnya memiliki 2 acara besar yang akan di adakan sekolah seperti maulid nabi maupun hari kemerdekaan. Biasanya acaranya dalam bentuk perlombaan dan para orang tua sendiri yang menjadi panitia dalam acara tersebut.

Dukungan Orang Tua Dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Dukungan orang tua dalam meningkatkan mutu sekolah di MI Islamiyah Kijang dalam bentuk melalui berpartisipasi aktif dalam komite sekolah, menjalin komunikasi yang baik dengan guru, dan memberikan dukungan anak dengan memberikan motivasi belajar, membantu mereka mengelola waktu, dan ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti perlombaan atau kunjungan belajar.

SIMPULAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MI Islamiyah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menjadi salah satu pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui otonomi sekolah. Penerapan MBS memberikan ruang bagi sekolah untuk mengelola sendiri berbagai aspek pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi sumber daya, dan tuntutan masyarakat. Implementasi MBS di MI Islamiyah Kijang mencakup beberapa aspek utama yaitu otonomi dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Sekolah telah memanfaatkan otonomi yang diberikan untuk mengelola kurikulum dan pembelajaran secara mandiri, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Pengembangan kurikulum mencakup adaptasi terhadap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yang didukung oleh pelatihan mini untuk guru. Selain itu, MI Islamiyah Kijang membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Bintan, serta dengan tokoh agama dan masyarakat. Kalender akademik, evaluasi pembelajaran, dan rapat rutin menjadi bagian penting dari otonomi yang dijalankan.

Transparansi tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk pengelolaan keuangan dan program-program yang dijalankan. Sekolah melibatkan pemerintah dan orang tua dalam pengambilan keputusan penting, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas ditunjukkan melalui peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan rutin, supervisi kepala sekolah terhadap proses pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Prestasi akademik siswa menjadi indikator nyata dari keberhasilan program ini.

Orang tua aktif berperan melalui paguyuban yang membantu penyelenggaraan acara besar seperti perayaan Maulid Nabi dan Hari Kemerdekaan. Selain itu, mereka juga mendukung program sekolah melalui komite sekolah, memberikan motivasi kepada anak-anak mereka, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan dan kunjungan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andang. (2014). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- E. Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya
- E. Mulyasa. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya
- Fattah Nanang. (2011). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya
- Fattah Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: C.V. Pustaka Bani Quraisy
- Moloeng Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya

- Nurdin Syaruddin. (2005). *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutikno Sobry. (2012). *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*. Lombok: Holistica
- Syafruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Rineka Cipta